

Sampai dengan tanggal 28 Februari 2021, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 1.334.634 kasus COVID-19 di seluruh 34 Provinsi di Indonesia, dengan 155.765 kasus aktif, 36.166 kematian, dan 1.142.703 orang telah dinyatakan pulih dari penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 71.668 orang.

Angka keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 akhir-akhir ini mengalami penurunan secara nasional. Pada saat ini, tidak ada angka keterisian rumah sakit yang berada di atas 70 persen, dengan angka tertinggi di Provinsi Banten sebesar 65 persen per tanggal 22 Februari 2021. Keterisian ruang ICU di rumah sakit rujukan Covid-19 di tujuh provinsi di Jawa dan Bali juga mengalami penurunan, dengan rata-rata di bawah 70 persen. Data ini menunjukkan situasi yang lebih baik dibandingkan dengan data Januari 2021.

Pasca gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021, Satuan Tugas COVID-19 provinsi melaporkan peningkatan signifikan jumlah penularan COVID-19 di provinsi tersebut; pada 6 Januari terdapat 2.020 kasus terkonfirmasi COVID-19, dan jumlahnya melonjak menjadi 5.042 orang pada 19 Februari. Para penyintas gempa bumi, masyarakat dan petugas kemanusiaan diminta untuk menerapkan secara ketat protokol kehatan tetang pemakaian masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak sosial.

Pada tanggal 18 Februari 2021, Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menyatakan bahwa Indonesia telah mengamankan lebih dari 420 juta dosis vaksin untuk 180 juta penduduk Indonesia, yaitu di tahun 2021 sebesar 340,5 juta vaksin (terdiri dari vaksin Sinovac 125,5 juta, Novavax 52 juta, Covax/Gavi 54 juta, AstraZeneca 59 juta, dan Pfizer 50 juta dosis) dan pada tahun 2022 sebesar 86,3 juta vaksin (Novavax 22 juta, Covax/Gavi 24 juta, AstraZeneca 23,8 juta, dan Pfizer 16,5 juta dosis).

Vaksinasi bagi tenaga kesehatan terus berlangsung, dan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua yang menasar orang dengan lanjut usia sebanyak 21,5 juta orang, dan tenaga kerja di sektor terpilih telah dimulai pada pertengahan Februari 2020. Sampai dengan 26 Februari, sekitar 2,6 juta dosis vaksin telah disalurkan. Sebanyak 1,6 juta warga telah menerima vaksin, dengan sekitar 1 juta diantaranya sudah mendapatkan suntikan kedua dari vaksin yang diproduksi bersama oleh perusahaan farmasi milik negara Bio Farma dan Sinovac Biotech.

Skema vaksinasi swasta (Gotong Royong atau Mandiri) akan berjalan seiring dengan Program Nasional, setelah Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, yang ditetapkan pada 24 Februari 2021. Skema swasta ini akan menargetkan karyawan / karyawan, keluarga dan individu lain yang terkait dalam keluarga. Saat ini, lebih dari 8.000 perusahaan telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam skema swasta ini, yang rencana pembeliannya akan melalui PT Bio Farma dan PT Kimia Farma.

Setelah melakukan evaluasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali yang dimulai pada 11 Januari 2021, Pemerintah menerapkan PPKM skala mikro yang dimulai pada 9 Februari 2021 dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Pada PPKM berbasis mikro, ada ketentuan pembentukan pos komando penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan, yang berfungsi mengendalikan zonasi di tingkat Rukun Tetangga (RT):

- o zona hijau: tidak ada kasus penularan virus corona di satu wilayah RT.
- o zona kuning: terdapat 1-5 rumah yang terkonfirmasi positif Covid-19 dalam satu RT selama tujuh hari terakhir.
- o zona oranye: terdapat 6-10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir.
- o zona merah: terdapat lebih dari sepuluh rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir. Di zona merah ini, diterapkan larangan kerumunan lebih dari tiga orang dan aktivitas ke luar-masuk mulai pukul 20.00, dan penutupan fasilitas umum seperti tempat ibadah, tempat bermain anak dan fasilitas umum lainnya.

PPKM berbasis mikro juga menyesuaikan jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan menjadi jam 21.00, dan maksimal 50 persen *work from office*. PPKM berbasis mikro berlangsung hingga 8 Maret 2021, dengan adanya kemungkinan diperpanjang.

Program-program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 berlanjut dengan anggaran Pemerintah yang disesuaikan menjadi sebesar IDR. 699,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup lima aspek:

- Kesehatan: IDR. 176,3 triliun,
- Perlindungan social: IDR. 157,4 triliun,
- Dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pembiayaan koperasi: IDR. 186,8 triliun.
- Usaha dan Pajak: IDR. 53,9 triliun.
- Program Prioritas: IDR. 125,1 triliun.

Berikut ini adalah kegiatan utama dari klaster Nasional Penanggulangan Bencana di bulan Februari 2021:

Koordinasi Klaster Nasional Penanggulangan Bencana

- Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 22 Februari memimpin rapat Klaster Nasional Penanggulangan Bencana, yang dihadiri oleh semua Kementerian dan Lembaga termasuk TNI dan Polri yang menjadi koordinator Klaster Nasional *Search and Rescue*, Kesehatan, Logistik, Pengungsian dan Perlindungan, Pendidikan, Sarana dan Prasarana, Ekonomi, dan Pemulihan Dini, para organisasi mitra Klaster Nasional dan perwakilan lembaga usaha. Dalam rapat tersebut, setiap koordinator klaster menyampaikan capaian dan kegiatan mereka. Salah satu kesepakatan adalah membuat peraturan yang update tentang Klaster Nasional.
- Pada tanggal 18 Februari, para pendukung Klaster Nasional membahas pembelajaran dan tindak lanjut dari Koordinasi disaat penanganan darurat Gempabumi Sulawesi Barat, usulan kegiatan prioritas tentang Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual, rencana Pekan Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan, dan advokasi bersama bagi kelompok disabilitas dan lansia terdampak bencana.

Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan

Antara 22 Februari sampai 2 Maret 2021, klaster ini menyelenggarakan Pekan Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan, dengan serangkaian diskusi sebagai berikut:

- Evaluasi Diklat TAGANA online di 10 Provinsi.
- Bantuan non-tunai selama periode COVID-19 di Indonesia: Pembelajaran dan Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Kerja Bantuan Non-Tunai 2021.
- Cerita dari Sulawesi Tengah untuk Indonesia terkait pengembangan kapasitas.
- Shelter: bukan sekedar tempat berteduh dan bertahan hidup.
- Rencana kontinjensi dan standar intervensi di sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- Prosedur tetap Pengungsian selama masa pandemi COVID-19.
- Pembelajaran Sulawesi Barat termasuk mekanisme umpan balik dari masyarakat dan Pembahasan Rencana Kerja Kelompok kerja Pemberdayaan Masyarakat.
- Sensitisasi Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang perlindungan dari kekerasan berbasis gender.
- Berbagai kegiatan dukungan psikososial saat terjadi bencana.
- Finalisasi pedoman dan rencana kerja Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan.
- Sensitisasi kelompok rentan disabilitas dan usia di wilayah terdampak bencana dan tips pengarusutamaannya.
- Koordinasi multipihak dan sosialisasi Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan.

Bantuan Non-Tunai

Pada tanggal 19 Februari, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan pertemuan persiapan monitoring dan evaluasi Penanganan Darurat Sulawesi Barat, yang direncanakan pada awal Maret 2021. Dalam pertemuan tersebut, Kelompok Kerja Bantuan Non-Tunai menyampaikan mengenai draft Pedoman Bantuan Non-Tunai Multiguna yang telah diselesaikan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah melakukan analisa, mempertimbangkan pembelajaran dari penanganan bencana gempabumi

dan tsunami 2018 di Sulawesi Tengah dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kelompok Kerja Bantuan Non-Tunai merekomendasikan bantuan transfer multiguna pada penanganan bencana di Sulawesi Barat sebesar IDR. 700.000 per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bantuan selama tiga bulan, yang dapat diberikan setiap bulannya atau sekaligus.
- Ketika tersedia alokasi dana, bantuan dapat ditambahkan satu bulan sesuai dengan kebutuhan.
- Penggunaan bantuan ini oleh penyintas bersifat tanpa pembatasan, sesuai dengan norma sosial, budaya, dan hukum yang berlaku.

Setidaknya sembilan organisasi yang tercatat melakukan bantuan nontunai di 41 desa di dua Mamuju dan Majene.

Pendidikan:

Pertemuan regular Pos Pendidikan di Sulawesi Barat terus berjalan. Save the Children Indonesia membantu koordinasi di Mamuju, Wahana Visi Indonesia melakukan kegiatan dukungan psikososial kepada 230 guru di Kabupaten Majene dan Mamuju, dan Baznas mendukung pendirian Ruang Ramah Anak di 5 titik di Kabupaten Mamuju dan Majene.

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan:

Pelaksanaan observasi 3M di tempat umum masih berlangsung dan dilakukan oleh lebih dari 4000 relawan Satgas Covid-19 di 26 Provinsi dan ditambah dukungan observer dari anggota Sub-Klaster. Dari hasil observasi didapatkan bahwa Praktik Pelaksanaan 3M cenderung menurun setiap minggunya. Perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) di masyarakat 53%, penggunaan masker 46%, praktik jaga jarak 45%. Akses terhadap fasilitas CTPS/Hand Sanitizer di tempat umum rata-rata masih rendah sekitar 31%, dengan lokasi yang paling rendah di terminal bis dan angkutan umum.

Kekerasan berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan:

Di bulan Februari, sub-klaster ini berfokus pada sosialisasi Peraturan Menteri KPPPA No 13/2020 tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender, Edukasi dan Penyadaran Masyarakat yang menasar tokoh agama dan laki-laki untuk wilayah Jabodetabek, Jawa Timur dan Banten,

Shelter

Setidaknya terdapat 16 organisasi yang membantu penanganan shelter di Sulawesi Barat, dengan mendistribusi bantuan darurat untuk shelter, barang non pangan, dan hunian sementara mandiri, menyusun standar untuk penanganan shelter di masa bencana dengan situasi pandemi COVID-19 dan mengusulkan opsi-opsi penanganan shelter untuk masa transisi darurat dan pemulihan.

Manajemen Informasi

Klaster dan sub-klaster Nasional yang menanggapi kebutuhan kemanusiaan di Sulawesi Barat melakukan update pemetaan penanganan bencana gempabumi di masing-masing sektor mereka, dan memantau perkembangan melalui pengkajian di lapangan dan rapat-rapat koordinasi.